

104

KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA (POLRI) DAN KEPEMIMPINAN MASYARAKAT;DALAM RANGKA MEMBANTU MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERKUALITAS,DAN BERWIBAWA

(Oleh; Drs Bambang Susetyo, Brigadir Jenderal Polisi)

1. PENDAHULUAN

Ada 2 (dua) peran yang hampir pasti pernah diemban oleh setiap orang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, peran tersebut adalah peran sebagai pengikut dan peran sebagai pemimpin di lingkungannya. Dalam hal ini, bila kita ingin dan sepakat untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara serta umat manusia, maka dalam mengemban peran sebagai pemimpin maupun dalam mengemban peran sebagai pengikut maka peran tersebut harus kita emban secara efektif. Harapan kita untuk mewujudkan Bangsa dan negara serta umat manusia yang maslahat akan cenderung menjadi khayalan, bila kita tidak mau memandang bahwa "kepemimpinan yang kurang efektif dan pengikutan yang kurang efektif adalah musuh besar kita bersama. Implikasinya, baik dalam mengemban peran sebagai pengikut maupun dalam mengemban peran sebagai pemimpin, kita perlu selalu bertanya pada hati nurani, apakah perilaku kita sudah sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang seharusnya kita hormati dan kita ikuti?"

Dilema yang kita hadapi saat ini,

yakni" terhambatnya penyelesaian berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara kita, satu diantaranya mungkin adalah sebagai akibat dari kurang efektifnya kepemimpinan dari beberapa pemimpin komponen bangsa kita dimasa lalu dan mungkin pula pada saat ini. Indikasi yang muncul akibat dari adanya kepemimpinan yang kurang efektif tersebut adalah munculnya kepengikutan yang kurang efektif, contohnya adalah; kerusuhan mas-sal, keresahan dan praktek pelanggaran hukum tanpa merasa bersalah (secara sadar) yang dilakukan oleh anggota masyarakat kita. Kalau kita benar-benar ingin dan sepakat untuk mewujudkan kemaslahatan Bangsa, Negara dan umat manusia sebagaimana bersifat dan tersurat serta diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, maka kondisi yang perlu secepatnya kita upayakan adalah kondisi keterpaduan antara kepemimpinan yang efektif dengan kepengikutan yang efektif. Apabila semua komponen Bangsa kita mampu mengemban perannya secara efektif, maka kondisi itulah yang penulis sebut sebagai kondisi

kepemimpinan dan kepengikutan yang efektif atau kemaslahatan Bangsa dan Negara.

Kepemimpinan POLRI, dan kepemimpinan masyarakat, adalah 2 (dua) peran pemimpin yang dari satu sisi dapat kita pandang berbeda, namun dari sisi yang lain dapat kita pandang sama. Adalah lebih bijak bila dalam diskusi ini "peran pemimpin POLRI dan peran pemimpin masyarakat kita pandang sama atau mereka kita pandang sebagai partner dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Bangsa kita, mengingat diskusi ini penulis orientasikan pada upaya membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan berwibawa. Rekeyasa untuk mewujudkan keterpaduan antara pemimpin POLRI dengan pemimpin masyarakat memang tugas atau pekerjaan yang berat, tetapi kalau kita sepakat untuk mewujudkan kemaslahatan Bangsa Negara dan Umat Manusia maka tugas dan pekerjaan tersebut akan menjadi lebih ringan karena kita pikul secara bersama-sama. Akan sangat bijak pula bila kita mampu memberi makna yang positif kepada ungkapan dalam pribahasa; Harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama", dalam konteks ini alangkah batilnya kita kalau seandainya kita meninggalkan nama kita (setelah mati) yang dicela atau di cibirkan oleh banyak orang akibat perilaku kita yang kurang efektif dalam manusia hidup kita sebagai pengikut atau pemimpin.

2. KEPEMIMPINAN DAN PENGIKUTAN YANG EFEKTIF

Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang fleksibel dan mau secara luas mempertimbangkan agenda orang lain saat mereka membuat agenda ke-pemimpinannya; kepemimpinan yang bisa membangun jaringan pendukung tidak hanya dengan bawahannya, tetapi juga dengan atasannya, teman sejawatnya, dan pihak luar, kepemimpinan yang tidak hanya tahu bagaimana bersaing atau berprestasi, tetapi juga tahu bagaimana bekerja-sama dengan pihak lain; kepemimpinan yang luas visinya, dan strateginya mendapat dukungan luas karena mempertimbangkan minat dari berbagai kelompok lain di-lingkungan strategisnya.

Prasyarat yang perlu dipersiapkan dalam rangka merealisasikan kepemimpinan yang efektif, diantaranya adalah;

- a. Mempunyai pengetahuan yang relatif luas mengenai induk organisasi dan fungsi atau perannya dalam unit kerjanya
- b. Mempunyai kemampuan menjalin hubungan kerja yang luas dan bagus dalam induk organisasi dalam unit kerjanya;
- c. Mempunyai nama baik dan catatan keberhasilan yang baik dalam berbagai aktifitas yang pernah diembanya
- d. Mempunyai kemampuan; menganalisis yang cukup kuat; mengambil keputusan yang baik,

- berpikir secara strategis dan multidimensi; serta mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan orang atau yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab organisasinya dan unit kerjanya;
- e. Berintegritas tinggi atau mau menghargai semua orang atau kelompok lain, dan mempunyai etika moral yang tinggi dalam berprestasi.
- f. Mempunyai banyak energi dan motivasi yang kuat untuk memimpin; dan
- g. Mampu membuat agenda perubahan yang adaptif dan antisipatif, serta mampu membangun jaringan pelaksanaan strategi yang kuat pada para pengikutnya.

Keberhasilan dalam proses kepemimpinan, selain dapat disebabkan oleh prasyarat di atas, dalam banyak kasus juga merupakan hasil atau akibat interaksi dari kepemimpinan yang efektif dengan kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan yang mampu menggerakkan para pengikutnya secara tanpa terpaksa). Pemimpin yang efektif hampir pasti mereka sadar bahwa keberadaannya sebagai pemimpin tidak akan berarti banyak atau bermanfaat optimal pada organisasinya jika mereka tidak didukung oleh pengikut secara efektif. Kepemimpinan yang efektif secara implisit dan eksplisit mengandung maksud kepemimpinan yang mampu menciptakan dan membina kondisi kepengikutan menjadi efektif, karena

kepemimpinan tidak mempunyai makna yang berarti kalau tidak disertai oleh pengikutan yang efektif. Dalam hal ini, kepemimpinan yang efektif dapat diamati dari kondisi kepengikutan yang efektif, oleh karena itu seorang pemimpin harus pula mengembangkan dan membina pengikutnya agar menjadi pengikut yang efektif.

Kondisi kepengikutan yang perlu dikembangkan dan dibina oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya menjadi efektif adalah;

- a. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka merasa bebas untuk berfikir kritis serta secara aktif melaksanakan perannya sebagai pengikut;
- b. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka menjadi mampu; mengurus dan mengatur dirinya sendiri; mengurus dan mengatur kegiatannya sendiri; proaktif membina hubungannya dengan pemimpinnya atau mereka merasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemimpinnya; dan tidak memerlukan pengendalian secara langsung dari pemimpinnya.
- c. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka secara sadar mau bertanggung jawab atau taat pada janjinya. Artinya mereka punya maksud untuk bertanggung jawab mengenai keberadaannya atau peran dan pekerjaannya; serta mereka merasa peduli terhadap pemimpinnya, permasalahan yang harus mereka

- selesaikan, dan para pembantunya.
- d. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka secara aktif mengembangkan dan menunjukkan kemampuannya, berusaha menjadi orang yang berhasil pada segala aspek; berusaha mengembangkan dan menguasai keahlian atau keterampilan yang bermanfaat untuk keunggulan dalam hal; apa yang mereka pedulikan atau impikan; dan bekerja keras pada segala jenis pekerjaan yang menawarkan hasil yang positif.
- e. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka secara aktif meningkatkan kontribusinya pada organisasi dan pemimpinnya melakukan pekerjaan tambahan atas prakarsanya sendiri; mengutamakan pekerjaannya yang paling penting menurut tanggung jawab utamanya berkontribusi pada teamnya dengan baik dan memandang anggota teamnya sebagai kolega dan bukan sebagai pesaing; meningkatkan fleksibilitas dan selalu ingin berkembang
- f. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka mampu mengetahui bagaimana membangun kepercayaan dari kawan sejawatnya dan dari pemimpinnya; secara cepat dan akurat menentukan kriteria keberhasilan yang nyata dengan apa yang terjadi secara nyata; jujur dalam mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalannya atau tidak

mengatakan lebih atau kurang dari apa yang mereka capai.

- g. Mengembangkan dan membina pengikutnya agar mereka berani bertindak menurut hati nurani; secara bebas membentuk pandangannya sendiri dan standar etika; bertahan pada keberadaannya dan mencoba bertindak secara aktif menurut hati nuraninya; menjaga kejujuran, pemimpinnya kawan sejawatnya, dan berani mengatakan tidak setuju bila hati nurani mengatakan tidak setuju.

Bila kriteria di atas kita acu dalam mencermati kondisi kepemimpinan dan kepengikutan dalam berbagai institusi formal dan institusi informal di Negara kita, ada indikasi bahwa masih banyak makna kriteria di atas yang belum mampu dipenuhi. Munculnya beberapa gejolak sosial, korupsi, kolusi, nepotisme, dan sampai terjadinya krisis kepercayaan di Negara kita saat ini; beberapa diantaranya adalah akibat dari adanya kepemimpinan dan kepengikutan yang tidak efektif atau adanya krisis etika dan moral pada beberapa komponen bangsa kita. Krisis etika dan moral yang sering kita saksikan atau didiskusikan di Media Massa umumnya bermula dari adanya pihak-pihak tertentu yang tidak mau menghormati peran pihak lain atau mereka tidak melaksanakan perannya sebagaimana yang diatur dalam, norma atau aturan Hukum yang berlaku. POLRI sebagai aparat penegak Hukum, pelindung dan pengayom masyarakat

pembina dan penjamin ketertiban dan keamanan. Dalam Negeri, dan di sisi lain, pemimpin masyarakat sebagai panutan masyarakatnya mempunyai tanggung-jawab moral yang sangat besar dan mungkin paling besar dalam memberantas habis terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma atau aturan Hukum yang berlaku di Negara kita ini,

3. KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) dan KEPEMIMPINAN MASYARAKAT SEBAGAI PARTNER

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru keberadaan POLRI tak henti-hentinya dijadikan bahan diskusi di Media Massa baik yang berkaitan dengan kelemahan POLRI dimasa lampau (di era Orde Baru) maupun yang berkaitan dengan lemahnya kapasitas POLRI dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab POLRI saat ini. Sebagai aparat Penegak hukum, tantangan yang paling nyata dihadapi oleh POLRI pada saat ini dan mungkin pula di masa depan, adalah perubahan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan proses Demokratisasi, serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum. Untuk dapat memenuhi tuntutan demokratisasi serta penegakan HAM dan hukum maka kapasitas kepemimpinan POLRI di masa depan perlu diorientasikan pada. Kapasitas Meta-Leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu berimajinasi dan

memprakirakan secara akurat tentang perubahan tuntutan masyarakat luas (Internasional, Nasional, dan Lokal). Dalam hal ini POLRI dituntut sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi diluar organisasi Polri (sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya), serta punya pandangan yang baik mengenai kecenderungan tugas dan tanggung jawab POLRI yang terjadi atau muncul dimasa depan.

b. Kapasitas Macro Leadership, yakni kepemimpinan yang mampu mengantisipasi dan menegalahkan musuh-musuh permasalahan POLRI, Bangsa dan Negara kita. Dalam hal ini, POLRI dituntut untuk memiliki visi dan strategi yang kompetitif (mampu mengalahkan musuh-musuh permasalahan POLRI) untuk dipakai mewujudkan visinya, serta terampil dalam melakukan perubahan dan dalam memobilisasi pengikutnya untuk bergerak secara bersama-sama untuk menuju atau mewujudkan masa depan yang baik.

c. Kapasitas Micro Leadership, yakni kepemimpinan yang secara efektif mampu membantu atau memfasilitasi proses merealisasi visi dan strategi POLRI dalam rangka memecahkan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab POLRI. Dalam hal ini, POLRI harus solid dalam memfasilitasi proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota POLRI baik dalam bentuk kepercayaan maupun dalam bentuk alat.

Dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih, berkualitas dan berwibawa di era Demokratisasi dan penegakan HAM dan Hukum, gaya kepemimpinan POLRI dituntut untuk mencerminkan opini-opini yang berkembang di masyarakat dalam arti luas, dan dituntut untuk mampu secara konsekuen menegakkan pelaksanaan prinsip dan kaidah Hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemimpin POLRI harus berperan sebagai pemimpin yang Demokratis atau mencerminkan kemauan dari masyarakat, dan persuasif atau mencerminkan kemauan Hukum tanpa melanggar HAM. Kemampuan POLRI untuk mempraktekkan atau mewujudkan gaya kepemimpinan yang Demokratis dan persuasif memerlukan bantuan dari para pemimpin masyarakat, seperti pemimpin organisasi formal dan informal dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah (mengakar pada rakyat)

Keserasian Kepemimpinan POLRI dan kepemimpinan masyarakat sebagai partner adalah kondisi kepemimpinan dan kepengikutan yang mutlak perlu dalam proses menciptakan pemerintah yang bersih, berkualitas, dan berwibawa. Tanpa bantuan dari pemimpin masyarakat, POLRI akan sulit melakukan penegakan HAM dan Hukum, atau sebaliknya, pemimpin masyarakat juga mengalami kesulitan dalam memelihara ketertiban, keamanan, dan penegakan HAM dan Hukum tanpa

bantuan POLRI. Keterpaduan dan keserasian tersebut akan terwujud bilamana saat POLRI berperan sebagai pemimpin dan saat non anggota POLRI atau anggota masyarakat lain yang berperan sebagai pemimpin sudah secara nyata bertindak dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menciptakan pemerintah yang bersih, berkualitas, dan berwibawa. Dalam proses berbangsa dan bernegara, mewujudkan pemerintahan yang bersih berkualitas dan berwibawa adalah tugas dan tanggung jawab bersama dari pemimpin POLRI serta pengikutnya dan pemimpin masyarakat serta pengikutnya. Oleh karena itu pemimpin POLRI serta pengikutnya dan pemimpin masyarakat serta pengikutnya secara bersama-sama dituntut untuk mampu memposisikan dirinya secara efektif saat mereka mengemban peran sebagai pemimpin atau pengikut di lingkungannya. Kondisi seperti ini mengisyaratkan bahwa semua komponen bangsa harus sadar (tanpa merasa terpaksa) mau menghormati peran pihak lain dan melaksanakan perannya sesuai dengan norma atau aturan Hukum yang berlaku.

Krisis etika dan moral seperti: pelecehan terhadap peran pihak lain, ingkar terhadap sumpah atau janji, dan mengabaikan peran diri sendiri menurut norma atau aturan hukum yang berlaku, telah sering disinyalir

terjadi pada beberapa Organisasi atau institusi di Indonesia. Akibat dari krisis etika moral tersebut, belakangan ini telah sampai pada mengakibatkan Indonesia mendapat predikat "Negara yang paling korup di dunia". Contoh kasus yang menjadi keprihatinan kita yang sangat mendalam adalah, POLRI sebagai Organisasi penegak Hukum banyak disinyalir sebagai Organisasi yang berimpit dengan Organisasi para penjahat, dan belakangan ini Organisasi POLRI sering didiskusikan di Media Massa berkenaan dengan indikasi terjadinya berbagai penyimpangan (penyalahgunaan wewenang dan Korupsi) oleh beberapa Oknum anggota POLRI. Kalau kita renungkan secara mendalam dan kita mau berkata jujur, bahwa munculnya berbagai krisis di Negara kita banyak diantaranya, adalah akibat dari makna yang tersirat dan tersurat dalam pribahasa "ikan itu busuk dimulai dari kepalanya".

Jika Polri mempunyai komitmen yang kuat untuk mencermati berbagai penyimpangan terhadap norma dan hukum yang masih sering terjadi pada saat ini, maka seharusnya POLRI memandang kondisi tersebut sebagai indikasi yang akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan, dan ketertiban dimasyarakat. Untuk

meminimumkan terjadinya beberapa penyimpangan yang serupa dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dimasa depan memang tugas berat bagi POLRI, tetapi tugas tersebut akan menjadi lebih ringan kalau terjadi POLRI mampu menjalin hubungan yang serasi (partnership) dengan berbagai pihak yang terkait dan berbagai pihak yang merasa berkepentingan dengan kemaslahatan Bangsa dan negara kita. Pihak yang penulis pandang strategis untuk diajak memerangi berbagai penyimpangan dan gangguan terhadap peran atau tugas pokok POLRI (memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat) adalah para pemimpin masyarakat yang terkait dan berkepentingan terhadap terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan berwibawa di Negara kita. Penulis yakin masih banyak anggota masyarakat yang berkepentingan terhadap kemaslahatan Bangsa dan Negara kita, dan masih banyak pula anggota POLRI yang tetap setia kepada nilai-nilai luhur yang tersirat dan tersurat dalam TRIBRATA dan CATUR PRASETYA POLRI.

Yang lebih menggembirakan bagi POLRI adalah bahwa KAPOLRI saat ini secara implisit dan eksplisit telah menyatakan visinya pada tanggal 17 Februari 2000 yakni untuk mewujudkan kemaslahatan POLRI, Bangsa

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Umat Manusia. Namun yang menjadi permasalahan bagi kita semua adalah "kapankah Bapak POLRI kita merumuskan dan melaksanakan strategi yang kompetitif (mampu mengalahkan musuh kemaslahatan : Polri Bangsa dan negara serta umat manusia?). Haruskah kita menunggu rumusan dan pelaksanaan strategi tersebut dalam kurun waktu yang lama?. Dan harus-kah sejarah keberadaan POLRI yang akan menjawabnya?". Menurut penulis, semakin cepat terwujudnya visi tersebut adalah semakin baik, sebelum permasalahan Bangsa dan Negara kita semakin kompleks dan sebelum citra POLRI semakin terpuruk, dan kalau bisa, jangan sampai visi tersebut menjadi catatan sejarah bagi Organisasi POLRI.

4. KESIMPULAN

a. Kepemimpin dan kepengikutan yang kurang efektif adalah musuh besar kita bersama, karena terhambatnya penyelesaian berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bangsa dan Negara kita, satu di antaranya mungkin adalah sebagai akibat dari kurang efektifnya kepemimpinan dari beberapa pemimpin komponen bangsa kita dimasa lalu dan mungkin pula pada saat ini. Oleh karena itu, peran Pemimpin POLRI dan pemimpin

masyarakat perlu kita pandang sama atau mereka perlu kita pandang sebagai partner dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Bangsa kita, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan berwibawa.

2. Pemimpin yang efektif, adalah mereka yang mempunyai : pengetahuan yang relatif luas; kemampuan menjalin hubungan kerja yang luas; nama dan catatan keberhasilan yang baik; kemampuan berfikir, menganalisis, mengambil keputusan yang baik; berintegritas tinggi; banyak energi dan motivasi yang kuat; kemampuan membuat agenda perubahan yang adaptif dan antipatif; dan kemampuan membangun jaringan pelaksanaan strategi yang kuat pada para pengikutnya.
3. Pemimpin yang efektif akan mengembangkan dan membina pengikutnya menjadi pengikut yang mampu: berfikir kritis; mengurus dan mengatur dirinya sendiri; bertanggung jawab; mengembangkan dan menunjukkan kemampuannya; meningkatkan kontribusinya; membangun kepercayaan; dan bertindak menurut hati nurani.
4. Kapasitas pemimpin POLRI dimasa depan perlu diorientasikan pada; kapasitas Meta-Leadership; kapasitas Macro Leadership; dan kapasitas Micro Leadership.

5. Keserasian kepemimpinan POLRI dan kepemimpinan masyarakat sebagai partner adalah kondisi pemimpin yang mutlak perlu, dan mereka dituntut untuk mampu mem-posisikan dirinya secara efektif dalam proses menciptakan pemerintahan yang bersih, berkualitas, dan berwibawa.

6. Pihak yang penulis pandang strategis untuk diajak memerangi berbagai penyimpangan norma dan aturan Hukum yang berlaku serta gangguan terhadap peran atau tugas pokok POLRI adalah para pemimpin masyarakat yang terkait dan kepentingan terhadap terwujudnya pemerintah yang bersih, ber-

kualitas, dan berwibawa di Negara kita.

7. Terwujudnya visi KAPOLRI tentang kemaslahatan POLRI, Bangsa dan Negara serta Umat Manusia tentu sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa anggota masyarakat kita yang masih punya etika dan moral. Bagi penulis, semakin cepat semakin baik, sebelum permasalahan Bangsa dan Negara kita semakin kompleks dan sebelum citra POLRI terjun bebas ke titik nol dan jangan sampai sejarah yang akan menjawabnya. Bagaimana pendapat sidang pembaca.